BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat banyak memunculkan berbagai perkembangan jenis dan bentuk mu'amalah yang dilakukan oleh setiap masyarakat pada saat ini, sehingga banyak menimbulkan persoalan baru, seperti halnya perkembangan dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar modal yang memunculkan persoalan terhadap penetapan Hukum Islam atas transaksi tersebut, Hukum Islam saat ini dihadapkan pada suatu problematika suatu sistem saham dan obligasi yang beredar tidak hanya di pasar modal tetapi juga di dalam dunia perbankan, efek tersebut diedarkan dalam berbagai bentuk transaksi misalnya dalam bentuk jual beli, investasi, pembiayaan, dan sebagainya, di mana pembiayaan tersebut bisa berupa penyertaan bagi hasil atau kredit (hutang) yang dijamin dengan surat hutang (obligasi) serta surat-surat berharga lainnya seperti saham, dan sebagainya. yang apabila di lihat dari sisi pendapatan laba mempunyai dua aspek yaitu *deviden* (untuk saham) bunga (untuk obligasi) dan juga keuntungan jual beli (*capital again*).

Obligasi merupakan surat pengakuan utang bersyarat, yang semua perjanjian obligasi tersebut harus dijelaskan dalam *prospectus*, dalam Islam perjanjian utang piutang diwajibkan harus dituliskan dalam suatu surat perjanjian

namun dilarang mengurangi utangnya ataupun adanya syarat tambahan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282-283, yaitu:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah Seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.²

Berkenaan dengan hutang-piutang tersebut, Al-Qur'an telah menggariskan beberapa peraturan untuk kebaikan kedua belah pihak yang berutang dan yang berpiutang. Keduanya telah diperintahkan untuk membuat perjanjian surat menyurat supaya nantinya tidak ada pihak yang lupa atau keliru sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, ayat di atas mengingatkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan hutang-piutang di antaranya: pertama; agar supaya utang-piutang yang telah ditentukan waktu pembayarannya hendaknya dibuatkan perjanjian surat-menyurat yang dipegang dan dipedomani oleh ke dua belah pihak tersebut. Kedua; adanya seorang penulis yang ditugaskan untuk menulis surat perjanjian utang-piutang ini

¹ Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Akhmad Abdul Karim, Terj. Imam Saefudin, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi* Islam, h.109

² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 70

dengan tidak menambah dan mengurangi jumlah hutang, tidak juga mengurangi atau menambah jangka waktu pembayaran serta menulisnya dengan jujur dan menyalin dari hal-hal yang bisa menyebabkan salah faham dan kekeliruan di kemudian hari. Ketiga; bagi orang-yang telah pandai tulis baca, janganlah enggan untuk menuliskannya, apabila di minta oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Keempat; yang membacakan (mendektekan) adalah apa yang akan dituliskan dalam surat perjanjian itu ialah orang berhutang, karena dialah yang lebih terikat dalam perjanjian itu. Maka ia hendaklah ia membacakan apa yang akan dituliskan itu dengan jujur dan menurut sebenarnya.³

Sedangkan obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut seperti misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Misalnya saja pada Obligasi pemerintah Amerika yang disebut "U.S. *Treasury securities*" diterbitkan untuk masa jatuh tempo 10 tahun atau lebih. Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun disebut "surat utang" dan utang di bawah 1 tahun disebut "Surat Perbendaharaan. Di Indonesia, Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah disebut

2

³ Bahrudin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Buku I, h. 447-449

Surat Utang Negara (SUN) dan utang di bawah 1 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Obligasi secara ringkasnya adalah merupakan utang tetapi dalam bentuk sekuriti. "Penerbit" obligasi adalah merupakan si peminjam atau debitur, sedangkan "pemegang" obligasi adalah merupakan pemberi pinjaman atau kreditur dan "kupon" obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan penerbitan obligasi ini maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi guna memperoleh pembiayaan investasi jangka panjangnya dengan sumber dana dari luar perusahaan.

Pada beberapa negara, istilah "obligasi" dan "surat utang" dipergunakan tergantung pada jangka waktu jatuh temponya. Pelaku pasar biasanya menggunakan istilah obligasi untuk penerbitan surat utang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada publik dan istilah "surat utang" digunakan bagi penerbitan surat utang dalam skala kecil yang biasanya ditawarkan kepada sejumlah kecil investor. Tidak ada pembatasan yang jelas atas penggunaan istilah ini. Ada juga dikenal istilah "surat perbendaharaan" yang digunakan bagi sekuriti berpenghasilan tetap dengan masa jatuh tempo 3 tahun atau kurang . Obligasi memiliki resiko yang tertinggi dibandingkan dengan "surat utang" yang memiliki resiko terendah yang

mana dilihat dari sisi "durasi" surat utang di mana makin pendek durasinya memiliki resiko makin rendah.⁴

Obligasi dalam definisi konvensional adalah surat hutang, maka meskipun telah direstrukturisasi seperti yang telah diterangkan di atas namun tetap ia merupakan dasarnya adalah surat hutang. Penulis tidak mengatakan bahwa obligasi syariah yang telah menghilangkan riba dan konsekwensi lain yang menyebabkan ia haram lewat rekontruksirisasi itu masih haram. Akan tetapi hanya ingin menerangkan bahwa sesungguhnya pemakaian obligasi syariah suatu hal yang gegabah karena kita memiliki instrumen lain yang murni, tidak perlu "disamak" seperti obligasi apalagi direkontruksirisasi. Sukuk ini merupakan sertifikat kepemilikan terhadap sebagian aset dalam suatu usaha. Kepemilikan ini dapat disandarkan dengan aqad mud]a>rabah, musya>rakah, ija>rah, istisna>' dan sebagainya.

Sukuk sudah jelas tidak ada yang perlu dipertentangkan. Lantas, obligasi yang dasar-dasarnya adalah surat hutang bagaimana apabila dijelaskan ketika mengadopsi "sembarang" dan menyandarkan kebolehanya menurut syariah kepada aqad-aqad yang terkesan dipaksakan, hanya *aqad murabahah* yang memungkinkan untuk digunakan. Bagaimana hutang itu digabung dengan syarat-syarat lain seperti pembagian hasil atau penerimaan *fee*. Bukankah hutang memiliki aturan "main" nya sendiri seperti *qard[* yang tidak memungut apapun. Bahwa hukum berhutang itu *mubah* dan juga bisa sunah tergantung situasi

⁴ http://id.search.yahoo.com/search; pengertian obligasi, diakses 24 Desember 2008

sedangkan membayarnya adalah wajib. Wajib bagi yang mampu membayar. Yang dikutip dalam h{adis Imam Bukhari sebagai berikut:⁵

"Penunda-nundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu ked}aliman." Dalam hadits yang lain diterangkan bahwa "Pengemplangan oleh orang berada menghalalkan pencercaan nama baiknya dan pengenaan Hadits kedua ini menjadi dasar hukuman kurungan bagi hukuman",6 pengemplang.

Bagi debitur yang belum mampu membayar tidak bisa dipaksakan dengan cara apapun apa lagi menjatuhkan denda seperti tambahan biaya, hal ini jelas-jelas riba. Bagi kreditur dianjurkan untuk berlapang dan bersabar sehingga kreditur mampu membayarnya. Demikian dijelaskan dalam al-Qur'an, h}adis dan figh. Dari h}adis} di atas dapat dijelaskan bahwa bagi debitur yang mengemplang dapat dijatuhkan denda seperti Iqab (hukuman) kurungan dapat dijatuhkan kepada debitur ini. Pendapat ini tidak diperselisihkan.

Namun terjadi perselisihan diantara para ahli hukum Islam (fuqaha) tentang apakah sanksi pidana berupa denda dapat dijatuhkan bagi pengemplang. Pendapat yang masyhur menyatakan sanksi pidana berupa denda tidak dapat dijatuhkan kepada debitur pengemplang. Dan juga mengenai pengenaan denda perdata murni (pengganti kerugian) tidak seorangpun dari ulama klasik yang

⁵ Al Bukhari, *S}ahih Al-Bukhari*, Bab al-Hiwalah Hadits Nomor 2143 dari Abu Hurairah, h. 861 ⁶ Ibid, Nomor 2271

membolehkannya karena itu dipandang tambahan yang akan diserahkan dan diterima kreditur adalah riba yang diharamkan.⁷

Pembaharuan pemikiran hukum Syaltut mencakup berbagai bidang antara lain bidang muamalah yang membahas status akan menggunakan keuntungan (fee) dari aktivitas bank tabungan, kantor pos, bidang persaksian, al-ahwal alsyakhsiyyah, di bidang jinayah, sedangkan pembahasan lain dalam bidang muamalah adalah mengenai status bidang obligasi. Syaltut berpendapat Bahwa obligasi itu diperbolehkan dalam keadaan darurat atau terpaksa untuk memenuhi suatu kebutuhan yang mendesak baik dalam suatu lembaga maupun pemerintahan.

Selain itu pembaharuan pemikiran hukum Syaltut, antara lain juga terletak pada upaya mengantisipasi tuntutan zaman berkaitan dengan kemajuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Seperti mengangkat masalah-masalah kontemporer (Inseminasi Buatan dan KB) tujuannya ialah agar pemikiran hukumnya sesuai dengan kondisi masa kini, pemikiran itu cukup maju. Apalagi jika di ingat bahwa hal itu dikemukakan pada sekitar dasawarsa 50 an.

Berdasarkan pemikiran Mahmud Syaltut di atas, penulis mencoba menganalisis lebih lanjut tentang obligasi yang dimaksud oleh Mahmud Syaltut dalam skripsi yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Hukum Obligasi"

http://id.Acehinstitute.Org/Index.Php?Meninjau kembali aqad obligasi syariah, diakses 24 Desember 2008

⁸ Salam Arief, Pembaharuan Hukum Islam, h. 228

B. Rumusan Masalah

Melihat pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, kiranya dan dapat diambil pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

- 1. Bagaimana konsep pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum Obligasi?
- 2. Apa dasar hukum pemikiran Mahmud Syaltut dalam memperbolehkan obligasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui konsep pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi serta alasan-alasan yang melatarbelakangi pemikirannya.
- 2. Untuk mendiskripsikan pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

- 1. Dapat menjadi bahasan hipotesis untuk penelitian selanjutnya.
- 2. Untuk menambah wawasan berfikir bagi peneliti.
- 3. Sebagai referensi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam pada umumnya dan masalah obligasi pada khususnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan antara pembahasan yang akan dikaji dengan pembahasan yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan kembali.

Memang ada beberapa hasil kajian mahasiswa syari'ah IAIN Sunan ampel Surabaya yang membahas tentang obligasi, diantaranya adalah :Tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Yusuf Qurdlawi tentang Zakat Saham dan Obligasi oleh Qurrota A'yun yang lebih menitikberatkan kepada penentuan terhadap pembayaran atau Kadar Zakat Saham dan Obligasi serta kedudukan dan tatacara pembayarannya.

Meninjau Kembali Aqad Obligasi Syariah Oleh Mustafa Kamal Rokan yang membahas tentang persoalan-persoalan Landasan Aqad Obligasi dan Sukuk secara kritis dalam perspektif fiqh Islam.

Hal ini jelas berbeda dengan pembahasan yang akan penulis paparkan dalam skripsi ini. Yang mana penulis mencoba mengkaji tentang studi analisis terhadap pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi.

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi, maka di sini penulis merasa perlu untuk mengkaji hal tersebut.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Hukum Obligasi", untuk memudahkan pemahaman kita sehubungan dengan judul tersebut di atas maka dari judul ini dapat di definisikan sebagai berikut:

Hukum Islam

: Menurut Mahmud Syaltut adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungan dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.9

Pemikiran

: Suatu proses aktif yang memungkinkan dunia obyektif di refleksikan dalam konsep putusan, teori dan sebagainya yang dikaitkan dengan pemecahan masalah. 10

Mahmud Syaltut

samping sebagai salah : Di satu ulama' dan cendekiawan muslim, dia juga seorang pakar dalam disiplin ilmu-ilmu keislaman sedangkan keahliannya yang paling menonjol adalah tentang hukum Islam (Al-Figh Al-Isla>mi>) yang bisa dilihat dari

⁹ <u>http://Hk-Islam</u>. blog spot.com/2008/09/Pengertian-Hukum-Islam-Syari'at-Islam.html
¹⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, h. 846

kebanyakan hasil karyanya adalah dalam disiplin ilmu fiqih, dia lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 serta di kenal sebagai tokoh ulama' intelektual juga pembaruan Islam.

- Hukum Obligasi

: Menurut Syaltut obligasi itu boleh dan tidak dosa, dia menganggap bahwa obligasi itu dapat disamakan dengan aktivitas pinjam-meminjam pada umumnya. Menurutnya jika si peminjam itu sangat membutuhkannya dan dalam keadaan darurat untuk memenuhi suatu kebutuhan maka obligasi itu diperbolehkan.

Jadi yang dimaksud dengan pemikiran Mahmud Syaltut tentang obligasi adalah pendapatnya yang berkaitan dengan tiga aspek dalam menentukan hukum tentang obligasi yaitu dengan terpenuhinya *Al-h}a>jah-Al-d}arurat-wa Al-mas}lah}ah}}.*

G. Metode Penelitian

1. Data

Data yang telah dihimpun dan dikumpulkan meliputi:

- a. Data tentang hukum obligasi dan dasar hukumnya
- Data tentang teori yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut mengenai hukum obligasi

- Data yang berhubungan dengan pembahasan pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi.
- d. Data tentang tinjauan hukum Mahmud Syaltut tentang obligasi.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh di atas dikumpulkan dan digali dari :

- a. Sumber Primer yaitu, buku atau karya ilmiah Mahmud Syaltut yang berjudul antara lain :
 - Al Fa>tawa>
 - Aqi>dah Wa Al-Syari>'ah
 - Tafsi>r Al-Qur'a>nul Kari>m, dan sebagainya.
- b. Sumber Skunder yaitu literatur yang secara lansung atau tidak langsung dapat menunjang untuk memahami dan menganalisis mengenai obligasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan cara literatur yaitu membaca dan menelaah buku-buku karya Mahmud Syaltut dan buku-buku lain yang menunjang penelitian dalam memahami dan menganalisis untuk diambil suatu kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis Diskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan diskripsi mengenai konsep pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi. Yang menjelaskan tentang dasar atau landasan hukum serta hasil istinbat hukum Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi.

b. Analisis Kualitatif

Analisis ini bertujuan untuk menguraikan data baik berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau pun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya yang berupa penjelasan-penjelasan.¹¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini berikut di kemukakan sistematikanya, yaitu:

- Bab I, Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II, Pada bagian pertama penulisan ini menguraikan tentang biografi dari Mahmud Syaltut yang diawali dengan masa kelahiran sampai pada aktivitas intelektual dan keilmuannya, dan pada bagian kedua penulisan ini akan menguraikan tentang beberapa karya-karya tulisannya.

¹¹ Joko Subagyo, *metode penelitian*, h. 106

- Bab III, Bab ini membahas tentang bagaimana pola pikir serta metode yang digunakan Mahmud Syaltut dalam mengemukakan pendapatnya tentang hukum obligasi dan hasil istinbat hukumnya.
- Bab IV, Bab ini merupakan analisis dari penulis terhadap pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi serta yang berkaitan dengannya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan Mahmud Syaltut dalam mengemukakan pendapatnya tentang hukum obligasi.
- Bab V, Bab ini merupakan kesimpulan dari analisis yang disampaikan untuk menjawab dari permasalahan seputar obligasi dilanjutkan dengan saran dari penulis.